

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah satu syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu negara. Pembangunan berkelanjutan merupakan poin penting yang harus dilakukan oleh sebuah negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Manusia merupakan aset yang sangat berharga dalam keberlangsungan ekonomi suatu negara. Demi meningkatkan kelanjutan ekonomi suatu negara, maka negara wajib melakukan pengembangan kualitas sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia disuatu negara dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia (IPM). (Sudarsana 2016 : 1)

Berdasarkan hasil *Human Development Index* (HDI) tahun 2013 (dalam Malik : 2014), Indonesia menempati peringkat 108 dai 187 negara dalam kategori daya saing antar bangsa di kancah Internasional. Pada tahun 2007 salah satu majalah Amerika Serikat, *Forbes Policy Magazine* menyebutkan bahwa Indonesia termasuk kedalam kategori negara gagal. (Astri 2013 : 78).

Menurut Katalog Badan Pusat Statistik dari laporan UNDP pada tahun 2016 dapat dilihat indeks pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2016

Negara	HDI	LEB (tahun)	ALR (%)	CGER (%)	GDP/capita \$ AS
Singapura	0.925	83.2	11.6	15.4	78.162
Korea Selatan	0.901	82.1	12.2	16.6	34.541
Malaysia	0.789	74.9	10.1	13.1	24.620
Indonesia	0.689	69.1	7.9	12.9	10.053

Sumber : diolah dari Laporan UNDP tentang HDI 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Indonesia menempati posisi terbawah dibandingkan negara-negara Asia lainnya dari semua parameter pengukuran.

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu ukuran standar dalam pembangunan manusia. Konsep IPM pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 kemudian dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). (Kahang *et al* 2016 : 130)

IPM merupakan proses perluasan pilihan bagi penduduk disuatu negara. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan derajat perkembangan suatu negara, apakah negara tersebut dikategorikan maju, berkembang, ataupun terbelakang. IPM dilakukan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara melalui 3 dimensi dasar, yaitu *longevity* (umur panjang dan sehat) yang diukur dengan angka harapan hidup (AHH), *knowledge* (pengetahuan) yang diukur dengan harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), serta *decent living*

(kelayakan hidup) yang diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). (Kahang *et al* 2016 : 135)

Jika menelusuri teori, pembangunan manusia memiliki peran yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu wilayah dengan di bantu oleh pengeluaran pemerintah maka wilayah tersebut akan jauh lebih berkembang. Hal ini terjadi karena pembangunan manusia yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat didalamnya, begitupun sebaliknya dengan kinerja ekonomi yang mencukupi maka alokasi pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia akan jauh lebih besar sehingga sumber daya manusia akan menjadi lebih berkualitas. (Sasana 2016 : 1)

Menurut Merang Kahang dkk, Investasi manusia (*Human Capital*) merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pembangunan manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang memiliki peran penting dalam proses penyerapan dan pengolahan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Kemajuan pada indikator pendidikan dan kesehatan sangat penting sebagai modal utama untuk membangun kualitas manusia. Setidaknya terdapat dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kaitannya dengan upaya meningkatkan taraf kelayakan hidup masyarakat yaitu sektor pendidikan dan kesehatan.

Pada Tahun 2016 Kabupaten Bandung menempati posisi tertinggi dalam peningkatan IPM di Jawa Barat bersama dengan Kabupaten/Kota lainnya, peningkatan IPM tersebut tercatat sebagai berikut:

Tabel 1.2 Peningkatan IPM Jawa Barat Tahun 2016

No	Kabupaten / Kota	Percepatan IPM
1	Kabupaten Bandung	1.43
2	Kota Bekasi	1.00
3	Kabupaten Bekasi	0.96
4	Kota Sukabumi	0.91
5	Kota Bandung	0.88
6	Kota Bogor	0.75
7	Kota Depok	0.68
8	Kota Cimahi	0.17

Sumber : Jendela Informasi Jawa Barat 2016

Menurut Jendela Informasi Jawa Barat Tahun ke tahun peningkatan IPM terus terjadi di Kabupaten Bandung. Bupati Kabupaten Bandung H. Dadang M Naser, SH, S.Ip., M.Ip menilai kontribusi terbesar dalam proses peningkatan IPM dilakukan oleh sektor pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran pemerintah. Tahun 2017 IPM Kabupaten Bandung telah mencapai angka 71.02 Angka ini meningkat 0.33 poin dibandingkan tahun 2016, yaitu sebesar 70.69 poin.

Berikut data kontribusi terbesar ketiga komponen dalam peningkatan IPM Kabupaten Bandung :

Tabel 1.3 Kontribusi IPM Kabupaten Bandung

Indikator	Kontribusi poin IPM
Kesehatan	81.74
Pendidikan	63.94
Belanja Pemerintah	69.29

Sumber : Website resmi Kabupaten Bandung data diolah 2017

Dari data tersebut pengeluaran pemerintah rupanya memiliki andil dalam peningkatan IPM. Anggaran pemerintah untuk kesehatan yang diterima Dinas Kabupaten Kabupaten pada tahun 2017 adalah sebesar 85 Miliar dari total APBN 2017. Sedangkan untuk sektor pendidikan Kabupaten Bandung mendapatkan dana sekitar 134.63 Miliar (20 persen dari total RAPBD Kabupaten Bandung sebesar 2.07 Triliun). Pengeluaran pemerintah ini semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. (Jendela Informasi Jawa Barat).

Atas dasar uraian diatas perlu dilakukan penelitian terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan mengkaji indeks pendidikan dan indeks kesehatan dilihat dari pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Bandung karena jika terbukti bahwa pengeluaran pemerintah memiliki andil yang cukup besar terhadap peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat, maka stimulasi kebijakan yang diambil lebih mengarah kepada bagaimana pengeluaran pemerintah digunakan untuk menciptakan mutu modal manusia yang berkualitas dengan cara meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dan Pendidikan terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bandung Tahun 2012-2017.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana indeks pembangunan manusia bidang kesehatan di Kabupaten Bandung tahun 2012-2017?
2. Bagaimana indeks pembangunan manusia bidang pendidikan di Kabupaten Bandung tahun 2012-2017?
3. Bagaimana efesiensi dan efektivitas Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bandung di Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan Tahun 2012-2017?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bandung tahun 2012-2017?
5. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bandung tahun 2012-2017?
6. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan bidang pendidikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bandung tahun 2012-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui indeks pembangunan manusia bidang kesehatan di Kabupaten Bandung tahun 2012-2017.
2. Untuk mengetahui indeks pembangunan manusia bidang pendidikan di Kabupaten Bandung tahun 2012-2017.
3. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah Kabupaten Bandung di bidang pendidikan dan kesehatan tahun 2012-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bandung tahun 2012-2017.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bandung tahun 2012-2017.
6. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan bidang pendidikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bandung tahun 2012-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Ilmiah

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data mengenai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bandung tahun 2010-2017.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data mengenai pengeluaran pemerintah per kapita bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bandung tahun 2012-2017.
3. Menambah ilmu pengetahuan dibidang ekonomi pembangunan khususnya terkait pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap peningkatan pembangunan sumber daya manusia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi alat evaluasi pemerintah Kabupaten Bandung dalam memaksimalkan kinerjanya dalam pembangunan ekonomi dan pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang.